

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

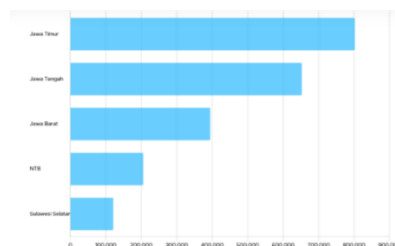
Indonesia dikenal sebagai negara maritim dikutip dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jumlah pulau di Indonesia sekitar 17.504 terdiri dari pulau besar dan kecil. Dengan panjang garis pantai pulau-pulau nusantara yang mencapai 81.290 km lebih menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, berdasarkan statistik aset kewilayahan nasional, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta km² termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan rincian luas kepulauan 2,8 juta km², luas laut teritorial 0,4 km², serta klaim atas Landas Kontinen di luar 200 mil seluas 3500 km² di sebelah barat Aceh.

Oleh karena itu jelas bahwa Indonesia memiliki lautan yang luas hal ini mendukung kegiatan dan mata pencaharian masyarakat Indonesia yang hampir keseluruhan sebagai nelayan maupun petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah nelayan menurut kategori orang pada tahun 2021-2022 sebanyak 122.212 (BPS, 2023), sedangkan berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 terdapat sekitar 29.617 petani garam di Indonesia Sherly dkk (2024). Dengan demikian, potensi kelautan dan

perikanan yang dimiliki Indonesia tidak hanya berkontribusi pada mata pencaharian masyarakat, tetapi juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan, khususnya dalam produksi garam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya garam nasional menjadi isu strategis yang tak terelakkan, terlebih di tengah wacana pengurangan impor garam yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah.

Berdasarkan data yang diberitakan oleh CNBC Indonesia pada 27 Maret 2025 Perpres No. 17 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menargetkan Indonesia mampu swasembada garam nasional pada tahun 2027, dengan pasokan kebutuhan industri harus berasal dari produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha lokal (Martyasari, 2025). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mencapai swasembada garam nasional pada tahun 2027.

Gambar 1. 1 Lima Provinsi Dengan Produksi Garam Terbanyak di Indonesia



Sumber: data.goodstats, 2024

Sejalan dengan upaya tersebut, data produksi garam dari beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan kontribusi signifikan dari daerah-daerah tertentu. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan produksi garam tertinggi, mendekati angka 850.000 ton. Disusul oleh Jawa Tengah dengan produksi sekitar 700.000 ton, dan Jawa Barat dengan sekitar 450.000 ton. Nusa Tenggara Barat (NTB) berkontribusi sekitar 200.000 ton, sementara Sulawesi Selatan memproduksi sekitar 100.000 ton. Data ini mencerminkan bahwa produksi garam di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur sebagai pusat produksi nasional, dengan daerah-daerah lain mulai menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut.

Namun demikian, meskipun beberapa provinsi menunjukkan produksi yang tinggi, kebutuhan dalam negeri masih belum sepenuhnya tercukupi. Berdasarkan data yang *diupload* oleh CNBC Indonesia, total impor garam Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,3 juta ton dengan nilai 1,35 triliun bahkan nilai impor garam di Indonesia terjadi lonjakan yang lebih tajam dari US\$ 124,4 juta menjadi US\$ 135,3 juta.

Gambar 1. 2 Jumlah Impor Garam (Ton) dan Nilai Impor Garam Indonesia



Sumber: Instagram *Consumer News and Business Channel* Indonesia (CNBC)

18/09/2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Impor garam menurut negara asal utama pada tahun 2017-2023 mayoritas garam yang diimpor Indonesia berasal dari Australia, dengan volume mencapai 2,15 juta ton atau hampir 77% dari total impor garam pada tahun 2023.

Gambar 1. 3 Impor Garam Menurut Negara Asal Utama Pada Tahun 2017-2023

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berat Bersih : Ton							
Australia	2.296.681,3	2.603.186,0	1.869.684,2	2.227.521,7	2.108.345,0	1.998.382,5	2.158.030,7
India	251.590,1	227.925,6	719.550,4	373.933,0	715.506,0	751.398,0	641.037,0
Selandia Baru	2.669,5	3.806,8	4.052,4	4.076,3	3.487,7	4.382,1	5.138,4
Tiongkok ²	219,3	849,8	540,9	1.321,4	2.470,1	1.377,0	1.506,1
Denmark	486,8	816,7	496,2	376,5	448,5	194,9	484,3
Jerman	300,1	236,0	243,0	231,2	201,8	286,0	304,0
Thailand	307,8	178,6	448,6	331,2	375,0	425,0	1.028,1
Lainnya	326,4	1.708,5	279,1	229,3	247,5	180,5	328,7
Jumlah	2.552.581,2	2.838.708,0	2.595.294,8	2.608.020,5	2.831.081,6	2.756.626,0	2.807.857,3
Nilai CIF: 000 US\$							
Australia	76.085,8	82.389,0	72.868,2	80.972,1	83.126,2	92.436,5	106.790,4
India	5.749,4	5.597,3	20.413,1	11.413,6	22.135,9	29.327,4	25.034,8
Selandia Baru	1.115,4	1.611,5	1.644,7	1.665,0	1.430,5	1.882,5	2.378,4
Tiongkok ²	24,6	99,2	48,0	132,9	340,2	294,7	319,2
Denmark	203,2	479,0	190,3	145,1	217,3	186,3	314,7
Jerman	158,2	127,0	110,3	110,8	171,0	155,9	182,9
Thailand	51,0	24,6	79,9	57,3	63,8	76,5	196,0
Lainnya	168,2	258,2	148,7	58,3	44,3	55,3	89,2
Jumlah	83.555,9	90.585,8	95.503,2	94.555,0	107.529,2	124.415,1	135.305,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safrida dkk (2021), Masih tingginya impor garam di Indonesia bukan tanpa alasan kondisi ini disebabkan permintaan garam yang terus meningkat, mencapai 4 juta ton. Perkembangan produksi dalam negeri yang kurang baik selain disebabkan oleh iklim, juga disebabkan oleh harga impor garam yang rendah (Safrida dkk, 2021). Selain itu impor garam disebabkan dengan adanya 3 faktor utama, yaitu rendahnya produksi garam lokal sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang sering terjadi seperti alih fungsi lahan pada komoditas garam memiliki dampak yang negatif untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional, curah hujan, penurunan minat petani dalam memproduksi

garam salah satunya karena dipengaruhi oleh harga garam itu sendiri, penggunaan teknologi secara umum proses produksi yang dilakukan oleh para petani masih menggunakan cara tradisional, dan tingginya permintaan garam nasional (Muclisin & Catur, 2021).

Berdasarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian SETJEN DPR RI Kecenderungan akan impor garam selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama rendahnya produksi dan kualitas produksi garam terutama kandungan NaCl yang masih di bawah 97%. Kedua, terkait lahan tambak garam dan kurangnya pembinaan petani garam. Ketiga, intervensi teknologi masih minim (Ricka & Rastri, 2022). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa masih tingginya impor garam di Indonesia terjadi karena rendahnya kualitas garam, permintaan garam nasional yang terus meningkat, teknologi yang kurang memadai, kurangnya pelatihan dan motivasi para petani garam serta minimnya lahan dan cuaca yang tidak menentu.

Akan tetapi di tengah tantangan tersebut, Ketua Koperasi Produsen Kristal Laut Nusantara, sekaligus pakar teknologi garam yang menemukan ilmu baru pembuatan garam sistem *tunnel*, yaitu Anwar Kuniawan mengajak para petambak garam dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu mulai bertransformasi dari sistem pengolahan tradisional ke metode *tunnel*, daerah pertama yang sukses dalam penerapan sistem *tunnel* ini adalah Daerah Istimewa Aceh, yaitu Kabupaten Pidie, yang mendapat dukungan *support* pembiayaan dari

pemerintah provinsi (Fajarcirebon, 2023). Sistem *tunnel* diklaim mampu meningkatkan jumlah produksi secara signifikan, yakni 10 hingga 12 kali lebih tinggi dibandingkan dengan metode perebusan. Selain itu, kawasan tambak garam di Pidie memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi eduwisata (MENKOMARVES, 2019).

Setelah berhasil diterapkan pertama kali di Kabupaten Pidie, Aceh pada tahun 2017 dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sistem *tunnel* garam mulai diadopsi oleh berbagai daerah lain. Kabupaten Aceh Timur menerapkannya di akhir tahun yang sama, disusul Kabupaten Sumenep di Jawa Timur yang mulai menguji coba teknologi ini pada tahun 2017. Kabupaten Tuban kemudian menjadi wilayah percontohan KKP pada tahun 2018 untuk peningkatan kualitas garam industri. Di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu dan Cirebon mulai mengenalkan sistem ini kepada kelompok petani lokal sebagai upaya peningkatan produktivitas garam rakyat. Di Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Pandeglang juga mulai mengadopsinya, termasuk Desa Panimbangjaya di Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu lokasi terbaru.

Di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes menjadi pelopor dalam penerapan sistem *tunnel* untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Kabupaten Cilacap memulai proyek percontohan di Desa Bunton pada 2017 dengan dukungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Kabupaten

Purworejo mengembangkan garam organik berbasis *tunnel* sejak 2018, sementara Kota Tegal memanfaatkan teknologi ini untuk menjaga stabilitas produksi sepanjang tahun, termasuk saat musim hujan. Penyebaran sistem *tunnel* di berbagai daerah menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung inovasi teknologi demi keberlanjutan industri garam rakyat.

Dari banyaknya daerah yang mengadopsi sistem *tunnel* garam terdapat salah satu daerah yang menunjukkan keberhasilan dalam mengadopsi inovasi sistem *tunnel* garam adalah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Keberhasilan ini tidak terlepas dari potensi alam dan kondisi geografis wilayahnya yang mendukung. Kabupaten Kebumen dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah dan kawasan yang masih asri. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Kecamatan Mirit pada awalnya mayoritas bekerja sebagai nelayan, dan belum memiliki aktivitas produksi garam. Produksi garam baru mulai berkembang setelah adanya pelatihan sistem *tunnel* garam yang diberikan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal pada tahun 2018.

Inovasi sistem *tunnel* ini kemudian diadopsi oleh sebagian nelayan sebagai mata pencaharian sampingan, sehingga muncullah kelompok-kelompok petani garam baru di Kecamatan Mirit. Oleh sebab itu, masyarakat pesisir Kebumen mulai memanfaatkan air laut untuk memproduksi garam sebagai komoditas bernilai jual, baik berupa garam konsumsi untuk memasak maupun garam non pangan seperti garam spa dan kecantikan.

Munculnya petani garam baru ini menjadikan produksi garam sebagai salah satu sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat pesisir. Selain untuk produksi, sebagian kelompok petani garam juga mengembangkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata edukasi yang dikenal dengan sebutan “Kampung Garam”. Kemunculan Kampung Garam ini tidak terlepas dari hadirnya inovasi sistem *tunnel* yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui program pelatihan. Inovasi tersebut menjadi pemicu lahirnya aktivitas produksi garam modern di Mirit, sekaligus terbentuknya Kampung Garam sebagai identitas baru kawasan berbasis inovasi lokal, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi garam, tetapi juga berkembang menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata berbasis garam di Kabupaten Kebumen.

Sistem *tunnel* garam merupakan salah satu difusi inovasi dari daerah lain melalui pelatihan. Kebumen tidak hanya menerima materi pelatihan (pengetahuan/*skill*), tetapi juga mengintegrasikan dan menerapkan inovasi ini ke dalam wilayahnya, membentuk Kampung Garam sebagai hasil nyata dari proses difusi inovasi. Kampung Garam memiliki tujuan agar masyarakat lokal terutama daerah Kabupaten Kebumen mampu memenuhi kebutuhan garam secara mandiri dan berkelanjutan, selain itu inovasi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan berusaha meningkatkan produksi garam lokal (Menpanrb, 2020). Kampung Garam pertama kali diresmikan pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 24 September 2019 yang berada di

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen oleh kelompok petani garam Jagad Kidul.

Gambar 1. 4 Kampung Garam Kabupaten Kebumen



Sumber: Google Maps Kampung Garam Kebumen ¹

Pada saat ini inovasi modern yang diterapkan dalam pembuatan garam di Kabupaten Kebumen dengan penggunaan *tunnel* garam yang merupakan inovasi terbaru yang disebarkan melalui pelatihan yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilatih oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Rumah *tunnel* yang diterapkan merupakan metode produksi garam yang memanfaatkan teknologi rumah kaca kristalisasi garam.

¹ <https://maps.app.goo.gl/2MAixZcqZiwY8t6D9>

Gambar 1. 5 Inovasi *Tunnel* Garam



Sumber: Peneliti ²

Penggunaan teknologi *tunnel* dalam produksi garam di wilayah pesisir selatan Kebumen bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pengeringan dengan cara yang lebih terkendali. Inovasi ini memungkinkan perlindungan terhadap garam dari cuaca buruk maupun kontaminasi, sehingga proses kristalisasi berjalan lebih optimal, bahkan saat musim hujan. Selain menghasilkan garam dengan tingkat kebersihan dan warna yang lebih baik, sistem ini juga mampu meningkatkan produksi hingga 60% serta menghasilkan dua jenis produk sekaligus, yaitu garam konsumsi dan garam spa. Kualitas garam yang dihasilkan pun lebih tinggi, dengan kadar NaCl yang mencapai lebih dari 97% (KTG, 2020).

² Didapatkan dari hasil survei lapangan

Gambar 1. 6 Garam Produksi Kampung Garam Kebumen



Sumber: Google Maps Kampung Garam Kebumen ³

Selain dijadikan tempat produksi garam, Kampung Garam Kabupaten Kebumen secara tidak langsung menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu tempat wisata karena penggunaan *tunnel* dianggap “unik” sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung. Kampung Garam ini juga dijadikan tempat eduwisata, praktik bagi para pelajar baik tingkat SMA/SMK sampai para akademisi untuk dijadikan bahan penelitian karena menggunakan cara produksi baru. Saat ini sistem *tunnel* garam sudah hampir tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Kebumen, yaitu Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit, Desa Sidoharjo Kecamatan Puring, dan Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan (PANRB, 2019).

Kampung Garam di Kabupaten Kebumen didukung oleh kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah, yaitu Perpres No. 17 Tahun 2025, Perpres ini mengatur tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

³ <https://maps.app.goo.gl/2MAixZcqZiwY8t6D9>

Beberapa poin penting dalam Perpres ini tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam nasional paling lambat tahun 2027. Perpres ini mencakup percepatan pembangunan pergaraman dari aspek pra produksi, produksi, pasca produksi, hingga pemasaran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertindak sebagai koordinator utama, didukung oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah. Perpres No. 81 Tahun 2024 Perpres ini berfokus pada Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. UU ini memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan petambak garam melalui program seperti PUGAR (Program Usaha Garam Rakyat). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. PP ini mengatur pemanfaatan ruang laut, termasuk untuk kegiatan produksi garam.

Selain itu Peraturan Daerah (Perda) juga mengatur terkait para petani garam dan produksi garam, yaitu PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman. Hingga saat ini, Kabupaten Kebumen belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang secara eksplisit mengatur percepatan pembangunan pergaraman, namun terdapat beberapa peraturan

yang mendukung sektor pertambangan secara tidak langsung, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Perda ini mencakup pengembangan kawasan usaha garam sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah. Selain itu ada pula Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. RPJMD ini memasukkan pengembangan Kampung Garam sebagai program strategis daerah.

Perkembangan pesat pada difusi inovasi *tunnel* garam di Kabupaten Kebumen membuktikan efektivitas model produksi garam berbasis lokal, tetapi juga semakin meningkatkan reputasi Kabupaten Kebumen yang mengadopsi inovasi ini. Keberhasilan ini kemudian berlanjut pada tingkat nasional, dimana inovasi tersebut mendapat pengakuan melalui berbagai penghargaan bergengsi.

Garam Kebumen telah meraih pengakuan sebagai salah satu dari 99 inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan tersebut, termasuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, mencakup 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2020 (Pratama, 2024). Selain itu Kampung Garam Kabupaten Kebumen sudah memenangkan banyak penghargaan, berkaitan dengan inovasi

pelayanan publik seperti, Penghargaan tingkat nasional yang di raih Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen melalui Inovasi Kampung Garam Kebumen, meraih penghargaan dari Kementerian PANRB dan masuk 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 (KemenPANRB) terpilih dari 114 inovasi yang dinilai dalam tahap seleksi panel, dari total 3.059 inovasi yang mendaftar, serta masuk nominasi 10 besar dan memperoleh hadiah tambahan APBD sebesar Rp 8 miliar.

Gambar 1. 7 Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020



Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan⁴

Selain itu penghargaan lain seperti penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai penerima penghargaan pesisir (*coastal award*) 1 pada KONAS Pesisir ke-10 Tahun 2021

⁴ <https://dlhkp.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/756/kampung-garam-kebumen-top-45-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2020>

untuk kategori kelompok masyarakat pada KONAS Pesisir ke-10 dengan peserta seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 1. 8 Penghargaan pesisir (*coastal award*) 1 pada KONAS Pesisir ke-10 Tahun 2021 untuk kategori kelompok masyarakat.



Sumber: Peneliti dan Website Desa Miritpetikusan⁵

Selain itu penghargaan yang diraih oleh Bapak Puji Santoso sebagai ketua kelompok usaha garam Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang meraih Juara Harapan III Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dengan jumlah 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen.

⁵ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

<https://miritpetikusan.kec-mirit.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/334>

Gambar 1. 9 Juara Harapan III Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Kabupaten Kebumen Tahun 2020



Sumber: Peneliti dan Youtube Kebumen TV News ⁶

Kampung Garam di Kabupaten Kebumen menggunakan sistem *tunnel* ini merupakan salah satu bentuk adopsi difusi inovasi yang memiliki dampak positif baik bagi para petani garam. Dampak positif yang dirasakan adalah proses produksi yang lebih cepat dan tidak bergantung pada musim selain itu adopsi inovasi *tunnel* garam ini lebih ramah lingkungan karena lebih sedikit menghasilkan limbah produksi dibandingkan dengan cara konvensional. Adanya nilai tambah dan pendapatan bagi para petani garam karena dalam produksi garam dengan inovasi ini tidak hanya menghasilkan garam konsumsi tetapi menghasilkan 2 jenis garam sekaligus, yaitu garam spa.

⁶ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DXtJYQrUdI4>

Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mendukung penuh adopsi *tunnel* garam pada Kampung Garam yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP). melalui program pemberdayaan petambak garam. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok petani garam, dan lembaga pendukung lainnya mempercepat proses difusi teknologi *tunnel* sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal berbasis potensi kelautan. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah daerah yang mengikutsertakan ke dalam perlombaan nasional dan pemberian dana untuk peningkatan fasilitas produksi garam.

Kelompok usaha garam rakyat yang mengelola Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kelurahan Miritpetikusan Kabupaten Kebumen diberi nama Kelompok Jagad Kidul, kelompok ini merupakan cikal bakal industri garam rakyat di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Kelompok petani garam Jagad Kidul merupakan kelompok petani yang berada di kawasan pesisir selatan Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah yang dikenal dengan nama Kampung Garam. Kelompok petani garam Jagad Kidul memiliki peran penting dalam pengembangan industri garam lokal, dengan memanfaatkan potensi alam di sekitar pesisir yang kaya akan air laut untuk diolah menjadi garam.

Bahkan saat ini Kelompok petani garam Jagad Kidul Desa Miritpetikusan, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2PMKP) yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penetapan ini menempatkan Jagad Kidul sebagai bagian dari jaringan P2MKP yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia, sekaligus menjadi satu-satunya kelompok di Kabupaten Kebumen yang memperoleh pengakuan tersebut.

Gambar 1. 10 Sertifikat penetapan P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan)



Sumber: Peneliti ⁷

Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen secara aktif mendukung pelatihan bagi petani garam, salah satunya melalui kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2018 oleh Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, bekerja sama

⁷ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Kelautan dan Perikanan Angkatan 6, khusus pada bidang pergaraman sistem *tunnel*, yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini berlangsung pada 19-24 Maret 2018 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Pantai Bopong, Desa Surejan, Kecamatan Puring, dan diikuti oleh 35 peserta dari lima kecamatan, yaitu Puring, Mirit, Klirong, Ayah, dan Ambal, termasuk para penyuluh perikanan. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mulai menerapkan ilmu yang diperoleh dalam praktik produksi garam di daerah masing-masing.

Gambar 1. 11 Sertifikat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Angkatan 6 Bidang Pergaraman Sistem *Tunnel*



Sumber: Peneliti⁸

⁸ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

Selain dari Dinas Kelautan dan Perikanan, pelatihan juga diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, yaitu memberikan Pelatihan Kemasan IKM Garam. Selain itu Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), melakukan pelatihan prosedur ekspor.

Gambar 1. 12 Sertifikat Pelatihan Kemasan IKM Garam



Sumber: Peneliti⁹

⁹ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

Gambar 1. 13 Sertifikat Pelatihan Prosedur Ekspor



Sumber: Peneliti¹⁰

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan upaya agar masyarakat dengan partisipasi yang tinggi untuk terus mengembangkan difusi inovasi yang dibuat lebih mumpuni dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan dan mempertahankan inovasi agar menjadi inovasi yang berkelanjutan dan tidak hanya sementara. Saat ini pengembangan Kampung Garam di Kabupaten Kebumen terutama Kecamatan Mirit mendapat respon yang baik oleh masyarakat sekitar yang mana ini merupakan peluang untuk terus mengembangkan ide yang inovatif lagi.

Tidak hanya itu saat ini Garam yang diproduksi di Kampung Garam Kebumen telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh

¹⁰ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

pemerintah (PPID, 2019). Proses produksi garam di Kampung Garam Kebumen dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kebersihan, dan kualitas agar produk yang dihasilkan aman dan layak konsumsi. Selain itu, garam ini juga sudah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang memastikan bahwa garam yang diproduksi tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga memenuhi persyaratan kesehatan yang ketat. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya kelompok petani garam di Kebumen yang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk mereka, serta dukungan dari berbagai pihak, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP). Kabupaten Kebumen dan badan-badan terkait lainnya. Dengan memenuhi SNI dan mendapatkan izin edar BPOM, garam dari Kampung Garam Kebumen tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas dengan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi.

Gambar 1. 14 Sertifikat Pelatihan Sistem Jaminan Halal



Sumber: Peneliti ¹¹

Gambar 1. 15 Sertifikat Pelatihan SNI: 2016, ISO 9001: 2015, *Sanitasi Hygiene*, CPPOB dan Teknik Internal Audit



Sumber: Peneliti ¹²

¹¹ Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

¹² Saya mendapatkan gambar ini dari informan (ketua kelompok usaha garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kebumen)

Dukungan terhadap pengembangan Kampung Garam di Kabupaten Kebumen tidak hanya datang dari pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama atau MoU yang melibatkan peran aktif kalangan akademisi, Seperti Universitas Gadjah Mada dan beberapa mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penelitian dan Pengembangan dari Universitas Putra Bangsa turut berkontribusi melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti kunjungan lapangan, diskusi kelompok bersama pengelola usaha, hingga penyusunan strategi pengembangan garam lokal.

Upaya ini menunjukkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi dalam mendorong keberlanjutan industri garam lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Implementasi dari Kampung Garam ini merupakan salah satu bagian dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ke-2, yaitu "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui produksi garam lokal yang berkualitas sehingga mengurangi ketergantungan pada impor garam. Kampung Garam Kebumen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta keberlanjutan lingkungan.

Ketahanan pangan nasional juga tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 81 Tahun 2024, Peraturan ini berfokus pada Percepatan

Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan lokal, serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber pangan. Perpres ini juga menekankan pentingnya perubahan pola konsumsi masyarakat dan dukungan kepada pelaku usaha pangan lokal.

Penguatan ketahanan pangan di Jawa Tengah didukung oleh landasan hukum yang jelas, salah satunya melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur tentang struktur dan tugas Dinas Ketahanan Pangan. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program-program strategis untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan mendukung keberlangsungan usaha petani lokal. Di tingkat kabupaten, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2013 juga menjadi dasar kebijakan ketahanan pangan yang berfokus pada pemberdayaan petani serta pengelolaan sumber daya pangan secara berkelanjutan. Peraturan tersebut mencakup pula mekanisme pemantauan dan evaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maritim dalam produksi garam, ketergantungan terhadap impor garam masih tinggi setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara potensi sumber daya alam dengan kemampuan pengelolaan, terutama pada sektor pergarahan lokal. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan metode

tradisional, kurangnya pelatihan, serta minimnya peran aktif pemerintah dalam memberdayakan petani garam.

Sebagai bentuk upaya perbaikan, pemerintah memperkenalkan sistem *tunnel* sebagai inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu wilayah yang berhasil mengimplementasikan inovasi ini melalui serangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta daerah yang pertama kali mencetuskan Kampung Garam. Keberhasilan ini menunjukkan adanya peran strategis pemerintah daerah dalam mendorong difusi inovasi kepada masyarakat.

Mengacu pada teori Difusi Inovasi oleh Everett Rogers, keberhasilan penerapan sistem *tunnel* di Kebumen mencerminkan empat elemen penting: adopsi inovasi yang unggul dan berhasil, penggunaan saluran komunikasi melalui pelatihan, waktu adopsi yang efektif, dan dukungan dari sistem sosial lokal. Keberhasilan ini juga terlihat dari penghargaan nasional yang diterima, penyebaran inovasi ke desa-desa lain, dan pencapaian standar mutu seperti SNI dan izin edar BPOM.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana proses difusi inovasi sistem *tunnel* garam dilakukan dalam konteks pengembangan Kampung Garam, khususnya di wilayah Kecamatan

Mirit, Kabupaten Kebumen. Penelitian-penelitian yang ada umumnya lebih berfokus pada aspek teknis produksi maupun pemasaran, bukan pada dinamika penyebaran inovasi yang melibatkan masyarakat dan aktor pemerintah secara lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana difusi inovasi sistem *tunnel* garam berlangsung dan berkontribusi terhadap terbentuknya Kampung Garam sebagai model pengembangan inovasi lokal yang berkelanjutan. Kelompok Jagad Kidul dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan kelompok yang pertama kali mencetuskan dan menerapkan inovasi Kampung Garam dengan sistem *tunnel* garam di Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Mirit. Keberhasilan penerapan inovasi di desa ini kemudian menjadi rujukan bagi desa lain, seperti Desa Tlogopragoto untuk mengadopsi inovasi serupa. Oleh karena itu, Kelompok Jagad Kidul dipandang sebagai aktor kunci dalam proses difusi inovasi.

Hal ini menjadi latar belakang bagi penulis dalam melaksanakan penelitian yang lebih dalam lagi terkait “Mengapa Difusi Inovasi Sistem *Tunnel* Garam Kelompok Jagad Kidul dalam Pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen berhasil dan mendapatkan penghargaan?”.

1.2 Identifikasi Keberhasilan

1. Terbentuknya Kampung Garam di Kecamatan Mirit sebagai model pengembangan inovasi lokal berbasis produksi garam.
2. Adopsi inovasi sistem *tunnel* garam oleh masyarakat Kecamatan Mirit menjadi pencetus aktivitas produksi garam di Kabupaten Kebumen.
3. Terselenggaranya proses penyebaran inovasi melalui pelatihan, pendampingan, dan komunikasi antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.
4. Inovasi Kampung Garam menjadi rujukan atau lokasi studi banding bagi daerah lain yang ingin mengembangkan produksi garam.
5. Kampung Garam mendapatkan penghargaan baik penghargaan tingkat daerah maupun tingkat nasional.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat tertentu, adapun manfaat tersebut sebagai berikut.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik mengenai difusi inovasi *tunnel* garam dalam pengembangan kampung garam.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan dilangsungkannya penelitian ini, peneliti bisa menambah pengetahuan mengenai keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

b. Bagi pemerintah dan dinas terkait

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan dinas Kabupaten Kebumen serta dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi pemerintah daerah lainnya sebagai percontohan pelaksanaan keberhasilan difusi inovasi khususnya Kampung Garam di Kabupaten Kebumen.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat umum tentang inovasi Kampung Garam di Kabupaten Kebumen.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang difusi inovasi.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Tujuan	Metode	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Ini
1	Sri Astuti, Anna Gustina Zainal, Nina Yudha Aryanti, Fri Rejeki Noviera (2023)	Menganalisis strategi komunikasi dari inovasi budidaya ikan dalam ember dalam proses Difusi Inovasi pada Masyarakat.	Kualitatif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers dan Floyd Shoemaker, 1962)	Budidaya ikan dalam ember disebarluaskan lewat media sosial dan <i>workshop</i> . Diadopsi masyarakat dan didukung pemangku kepentingan (DKP & PKK Lampung). Proses difusi melalui media efektif dalam membangun ketahanan pangan.	Fokus pada difusi inovasi sistem <i>tunnel</i> garam dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian Sri Astuti dkk. mengkaji strategi komunikasi dalam difusi inovasi budidaya ikan dalam ember pada masyarakat.
2	Eli Jamilah Mihardja, Aqil Azizi, Sirin Fairus (2022)	Menjelaskan proses dan hasil program PKM (pengabdian kepada masyarakat) dalam pembuatan chitin dan chitosan dari limbah rajungan di Indramayu serta mengevaluasi peran teori komunikasi (khususnya Difusi Inovasi) dalam	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 1983)	Penerapan teori Difusi Inovasi sangat penting dalam kegiatan PKM agar inovasi bisa diterima dan diadopsi oleh masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat lebih memahami nilai limbah rajungan sebagai bahan bernilai ekonomi tinggi jika proses difusi dilakukan melalui pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.	Menitikberatkan pada proses difusi inovasi teknologi produksi garam melalui sistem <i>tunnel</i> pada kelompok petani garam, sementara penelitian Eli Jamilah Mihardja dkk. membahas difusi inovasi dalam program pengabdian masyarakat terkait pengolahan limbah rajungan menjadi chitin dan chitosan.

		keberhasilan program tersebut.				
3	Nining Ayu Pratiwi dan Pajar Hatma Indra Jaya (2024)	Mengidentifikasi dan menganalisis proses adopsi difusi inovasi dalam program budidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid, serta bagaimana inovasi tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengeluarkan desa dari status tertinggal dan miskin.	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 2003)	Proses adopsi inovasi berhasil melalui kelima tahap; inovasi diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Program budidaya ikan patin berhasil meningkatkan ekonomi desa secara signifikan, menciptakan usaha baru (olahan patin), dan menjadikan Desa Koto Mesjid sebagai desa berkembang.	Objek inovasi dan konteks kajian, di mana penelitian ini mengkaji difusi inovasi sistem <i>tunnel</i> garam dalam pengembangan Kampung Garam. sedangkan penelitian Nining Ayu Pratiwi dan Pajar Hatma Indra Jaya meneliti difusi inovasi budidaya ikan patin dalam peningkatan perekonomian desa.
4	Melvin Bonardo Simanjuntak dan Elke Alexandrina (2022)	Melihat bagaimana Proses Difusi Inovasi Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Rusun Marunda dalam Memproduksi Kain Batik Semanggi (Studi Deskriptif pada Label Sejauh Mata memandang).	Kualitatif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 1995)	Difusi inovasi di Rusun Marunda terjadi melalui desain Batik Semanggi dari Chitra Subyakto lewat label Sejauh Mata Memandang. Inovasi ini cepat diadopsi oleh penghuni Rusun. Komunikasi yang terjadi bersifat satu arah, di mana Chitra lebih banyak memberikan informasi dan arahan. Rekomendasi untuk meningkatkan difusi adalah menggunakan media komunikasi	Penelitian ini berfokus pada difusi inovasi teknologi produksi garam pada komunitas petani garam, sedangkan penelitian Melvin Bonardo Simanjuntak dan Elke Alexandrina membahas difusi inovasi pemberdayaan perempuan dalam produksi batik Semanggi di Rusun Marunda.

					yang lebih beragam serta mendorong pembangunan berkelanjutan bersama kaum perempuan Rusun Marunda.	
5	Dewi Noor Azijah, Lina Aryani, Rachmat Ramdani (2021)	Meningkatkan kemampuan adaptasi UMKM (khususnya BSF Maggot Farm) terhadap dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui difusi inovasi kewirausahaan.	Kualitatif <i>Participatory Learning and Action</i> (PLA)	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 1995)	Sosialisasi produk menjadi lebih luas melalui <i>marketplace</i> dan media sosial. tetapi penjualan belum meningkat signifikan karena masih dalam jangka pendek.	Penelitian ini mengkaji difusi inovasi sistem <i>tunnel</i> garam dalam sektor produksi garam rakyat, sementara penelitian Dewi Noor Azijah dkk. berfokus pada difusi inovasi kewirausahaan pada UMKM Maggot Farm dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19.
6	Dina Rahmawati, Joko Winarno, Widiyanto (2024)	Menganalisis proses difusi adopsi inovasi <i>rice transplanter</i> serta pengaruh karakteristik inovasi pada kecepatan proses adopsi di Kelompok Tani Sumber Makmur.	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 1983)	Penelitian menunjukkan bahwa difusi inovasi <i>rice transplanter</i> berlangsung relatif cepat, mencakup empat elemen utama menurut teori difusi inovasi: inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Inovasi ini disebarluaskan melalui program pelatihan berupa studi banding ke Unit Pengelola Jasa Alsintan pada tahun 2016, yang diikuti oleh perwakilan kelompok tani.	Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis inovasi yang dikaji, di mana penelitian ini membahas difusi inovasi teknologi <i>tunnel</i> garam pada kelompok petani garam, sedangkan penelitian Dina Rahmawati dkk. meneliti difusi inovasi penggunaan <i>rice transplanter</i> pada kelompok tani pertanian.

7	Rani Diah Anggraini (2020)	Menganalisis proses difusi inovasi PLTB dalam rangka restorasi gambut dan mencegah kebakaran lahan.	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 2003)	Komunikasi interpersonal efektif dalam mendorong adopsi inovasi PLTB. Peran opinion leader penting. Namun kendala infrastruktur dan budaya lokal menjadi tantangan utama.	Penelitian ini mengkaji difusi inovasi teknologi produksi garam dalam pengembangan Kampung Garam, sedangkan penelitian Rani Diah Anggraini berfokus pada difusi inovasi teknologi PLTB dalam upaya restorasi gambut dan pencegahan kebakaran lahan.
8	A. R. Isra dan M. Muktiali (2022)	Menganalisis proses difusi inovasi pada produk batik di Kelurahan Jenggot dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal Kota Pekalongan.	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 2003)	Difusi inovasi motif batik di Kelurahan Jenggot berlangsung aktif melalui adopsi inovasi produk baru (seperti batik polkadot dan batik abstrak). Difusi dipengaruhi oleh karakteristik pelaku usaha dan lingkungan usaha. Inovasi ini membantu mendukung daya saing industri batik lokal.	Penelitian ini terletak pada fokus inovasi dan sektor kajian, di mana penelitian ini membahas difusi inovasi teknologi produksi garam pada masyarakat pesisir, sementara penelitian A. R. Isra dan M. Muktiali meneliti difusi inovasi produk batik dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Pekalongan.
9	Devie Yusdiana, Lisa Fani Suhati, dan Fitri Delimasari Piliang (2023)	Memberikan gambaran dan wawasan bagi para pihak bahwa proses difusi inovasi desa wisata dapat dilakukan dengan	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 1983)	Proses difusi inovasi pengembangan hutan wisata Limpakuwus dengan cara mendirikan koperasi jasa hutan pinus Limpakuwus terjadi karena adanya kesadaran dan kebutuhan bersama bahwa pengelolaan hutan wisata harus dilakukan dengan	Penelitian ini berfokus pada difusi inovasi sistem <i>tunnel</i> garam dalam pengembangan Kampung Garam, sedangkan penelitian Devie Yusdiana dkk. membahas difusi inovasi dalam

		model pengembangan masyarakat berbasis aset, agar model ini dapat diterapkan di daerah lain.			badan hukum legal agar dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan perluasan usaha dengan adanya suatu badan usaha yang dimiliki secara bersama-sama.	pengembangan desa wisata berbasis aset masyarakat.
10	Resinta, Anuar Rasyid, dan Muhammad Firdaus (2024)	Menganalisis karakteristik inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, serta sistem sosial dalam adopsi program Kelompok Tani Hutan.	Kualitatif deskriptif	<i>Diffusion of Innovation</i> (Everett Rogers, 2003)	Inovasi program Kelompok Tani Hutan telah memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Difusi inovasi ini berlangsung sejak 2013 melalui komunikasi interpersonal serta media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Sistem sosial yang terlibat meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan, penggagas, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah desa hingga provinsi, serta para petani sebagai <i>early adopter, early majority, dan late majority</i> .	Penelitian ini mengkaji difusi inovasi teknologi <i>tunnel</i> garam pada kelompok petani garam di Kecamatan Mirit, sementara penelitian Resinta dkk. meneliti difusi inovasi program Kelompok Tani Hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang proses difusi inovasi dalam berbagai konteks, seperti budidaya ikan dalam ember, pengolahan limbah rajungan, pengembangan wisata desa, hingga industri batik, namun sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses adopsi inovasi oleh masyarakat atau kelompok penerima manfaat. Selain itu, fokus utama banyak penelitian masih terbatas pada tahapan difusi inovasi berdasarkan teori Everett Rogers tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana proses penyebaran inovasi tersebut difasilitasi dan didukung oleh aktor-aktor lokal secara sistemik.

Sampai saat ini, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menyoroti keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam dalam konteks pengembangan Kampung Garam, khususnya di Kabupaten Kebumen yang menjadi pelopor dalam inisiatif tersebut. Padahal, proses seperti pelatihan teknologi, pembinaan, dan penyediaan sarana prasarana merupakan langkah penting dalam mentransfer pengetahuan dan membentuk kesiapan sosial dalam mengadopsi inovasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam bagaimana difusi inovasi sistem *tunnel* garam berlangsung, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya dalam mendorong terbentuknya Kampung Garam sebagai model inovasi lokal yang berkelanjutan.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*”. “*ad*” yang berarti intensif dan “*ministrare*” berarti melayani atau memenuhi, sehingga “*administrare*” adalah melayani atau memenuhi secara intensif.

Nicholas Hendry memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik menggunakan tujuan mempromosi pemahaman tentang kiprah pemerintah dalam hubungannya menggunakan rakyat yang diperintah, serta pula mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan rakyat. Definisi administrasi publik ialah kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif pada warga (dalam, Keban, 2019: 7).

Nigro & Nigro (dalam, Keban, 2019: 6) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan perjuangan kerja sama gerombolan dalam suatu lingkungan publik, yang mencangkup 3 cabang, yaitu yudikatif, legislatif, serta eksekutif memiliki suatu peranan krusial pada memformulasikan kebijakan publik, sebagai akibatnya berasal dari proses politik yang sangat berbeda menggunakan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta

dan individu pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional, yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok menjadi aktivitas publik yang benar-benar berbeda dari aktivitas swasta.

Menurut Rosenbloom (dalam Keban, 2019: 6) memberi batasan administrasi publik menjadi pemanfaatan teori-teori serta proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, serta yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan serta pelayanan terhadap rakyat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis aktivitas pemerintah, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurut Starling melihat administrasi publik menjadi semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai menggunakan yang dijanjikan pada ketika kampanye pemilihan. dengan kata lain batasan tadi menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik (dalam Keban, 2019).

Berdasarkan gagasan serta pengertian administrasi publik yang sudah dikemukakan para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses penyusunan, pengimplemantasian, serta penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan yang terbaik pada masyarakat agar tercapainya tujuan bersama.

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian administrasi publik, karena membahas bagaimana inovasi publik dalam hal ini sistem *tunnel* garam disebarluaskan kepada masyarakat melalui proses difusi. Dalam konteks administrasi publik, pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui penyebaran inovasi lokal. Inovasi seperti pelatihan sistem *tunnel* garam merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembangunan berbasis potensi lokal.

Administrasi publik tidak hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya melalui proses politik, hukum, dan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pandangan para ahli, administrasi publik mencerminkan upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara langsung dan nyata. Oleh karena itu, pelatihan inovasi *tunnel* garam yang diinisiasi pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi fungsi administrasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah,

yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Keban, 2019).

Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2019: 41), menyebutkan dalam administrasi publik terdapat enam paradigma adalah:

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik dan Administrasi) 1900-1926

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menjadi pencetus paradigma tersebut, mereka mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Seharusnya tidak hanya ditekankan pada lokus tetapi tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan.

2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi) 1927-1937

Willoughby, Gullick & Urwick menjadi pencetus paradigma ini, mereka memperkenalkan sebagai POSDORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Dalam paradigma ini lebih menekankan pada fokus administrasi publik tepai

untuk lokus tidak begitu diungkapkan pada paradigma ini karena prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku di mana saja (*universal*).

3. Paradigma 3 (Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik) 1950-1970

Dalam paradigma ketiga, banyak ahli mempertanyakan kembali perihal menguraikan administrasi dan politik sebagai hal yang selalu berhubungan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal karena selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma baru yang menganggap bahwa administrasi sebagai ilmu politik sehingga lokusnya adalah birokrasi pemerintah dan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi mengandung banyak kelemahan.

4. Paradigma 4 (Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi) 1956-1970

Dalam paradigma keempat ini prinsip-prinsip manajemen sebelumnya dikembangkan lebih mendalam. Fokus dari paradigma ini, yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi. Paradigma ini berorientasi pada dua arah, yaitu berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni dan pada kebijakan publik. Seluruh fokus yang terdapat di dalam paradigma ini dapat diterapkan dimana saja sehingga lokusnya menjadi kabur.

5. Paradigma 5 (Administrasi publik sebagai Administrasi Publik) 1970-sekarang

Pada paradigma ini lokus dan fokusnya sudah jelas. Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik adalah fokusnya masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik adalah lokusnya.

6. Paradigma *Governance* 1990-sekarang

Governance merupakan bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya (Astuti, dkk 2020).

Menurut G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2019: 48) mengagas empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik. Empat paradigma tersebut adalah:

1. *Traditional public administration*

Paradigma ini berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas.

2. *Public management*

Paradigma ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip manajemen dan memusatkan peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil

ukuran sektor publik, dan dominasi dari *Traditional public administration*.

3. *New public management*

NPM memiliki prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, *out-sourcing*, dan *contracting out*, serta promosi etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.

4. *Governance*

Paradigma ini memusatkan pada mekanisme dan proses di mana para warga masyarakat dan kelompok dapat menyampaikan kepentingannya. Sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Inti dari paradigma ini memperkuat interaksi antar ketiga aktor dalam mempromosikan *people-centered development*.

Penelitian ini berada dalam ranah paradigma Manajemen Publik karena menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik melalui pendekatan kolaboratif dan berorientasi hasil. Program difusi inovasi sistem *tunnel* garam di Kampung Garam Kebumen mencerminkan prinsip NPM, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam memperkenalkan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi, kualitas produksi, dan kemandirian masyarakat lokal.

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2019: 108) manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu memanfaatkan sumberdaya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen publik merupakan bidang spesialisasi yang tergolong baru, meskipun memiliki akar yang kuat dalam pendekatan normatif. Tokoh pelopornya adalah Woodrow Wilson, melalui tulisannya yang berjudul *The Study of Administration* pada tahun 1887. Dalam karya tersebut, Wilson secara eksplisit membahas tentang manajemen publik dan mendorong agar Ilmu Administrasi Publik mengadopsi pendekatan yang lebih menyerupai praktik bisnis, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan, serta menata ulang aspek organisasi dan metode kerja birokrasi (dalam Keban, 2019).

Menurut Overman (dalam Keban, 2019: 109) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi *management* seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi dengan sumber daya manusia,

keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain. Pasolong menerjemahkan manajemen publik sebagai “manajemen instansi pemerintah” (Iwan, 2012).

Wilson (dalam Keban, 2019: 117) meletakkan prinsip dasar administrasi publik yang mewarnai manajemen publik, yaitu:

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama
3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik

Menurut George R. Terry (dalam Hamdi, 2020: 156) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu POAC perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), pengawasan (*Controlling*). Kemudian David Garson dan Overman (dalam Keban, 2019: 119) mengemukakan model PAFHRIER (*policy analysis, financial management, human resources management, information management, dan external relations*). Yang menekankan pada perbedaan manajemen dalam organisasi publik dan dalam organisasi swasta.

Seiring waktu ke waktu muncullah paradigma yang sangat terkenal karena bersifat reformatif, yaitu “*Reinventing Government*” yang dikenal

dengan nama *New Public Management* (NPM). Perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan bahwa pendekatan administrasi klasik dianggap kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan publik serta dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat. Sebagai respon atas kelemahan tersebut, muncul paradigma baru yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM).

Pendekatan ini menekankan penerapan prinsip dan praktik manajemen modern ke dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik. Hood (Vigoda, 2003: 813 sebagaimana dikutip dalam Keban, 2019: 46) terdapat tujuh prinsip utama yang membentuk doktrin NPM, yaitu:

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, dan
7. Penerapan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya

NPM kemudian berkembang menjadi pendekatan yang dinamis dengan beberapa orientasi utama. Pertama, orientasi efisiensi (*the efficiency*

drive) yang menekankan pentingnya efisiensi sebagai ukuran utama kinerja birokrasi. Kedua, orientasi *downsizing and decentralization*, yaitu penyederhanaan struktur birokrasi serta pelimpahan kewenangan kepada unit-unit yang lebih kecil agar mampu bertindak cepat dan tepat. Ketiga, orientasi *in search of excellence*, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja unggul melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, muncul orientasi keempat yang dikenal sebagai *public service orientation*. Model ini menekankan pentingnya kualitas layanan, kejelasan misi organisasi publik, serta nilai-nilai pelayanan yang berpihak pada masyarakat. Pendekatan ini memberi perhatian besar terhadap kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi pengguna layanan, memperkuat peran pejabat publik dan wakil masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menekankan pembelajaran sosial (*societal learning*), partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, penelitian berakar pada paradigma Manajemen Publik dan menekankan pada paradigma *New Public Management*, karena menyoroti bagaimana pemerintah daerah merancang dan mengelola proses difusi inovasi kepada masyarakat, salah satunya melalui pelatihan teknologi sistem *tunnel* garam. Dalam manajemen publik, pemerintah dituntut untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelaksanaan pelatihan tersebut mencerminkan penerapan fungsi-fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring perkembangan administrasi publik modern, paradigma ini kemudian berkembang menjadi *New Public Management* (NPM) yang lebih menekankan pada inovasi, orientasi hasil, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

1.6.5 Inovasi

Pengertian inovasi berasal dari bahasa latin "*innovation*" dengan arti pembaharuan dan perubahan. (*innovation*) berasal dari kata latin *innovationem* mengacu pada suatu hal yang baru sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Pengertian dari inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya (Awan, 2022). Stephen Robbins (1994), mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa (dalam Acuh, 2022).

Rosenfeld (dalam Acuh, 2022: 57) menjelaskan inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru, atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan ide dalam sekumpulan informasi yang berhubungan diantara masukan dan luaran inovasi dianggap sebagai proses penciptaan dan penerapan dari perpaduan unsur-unsur baru (Awan, 2022).

Rahmawati dan Nurachadija (dalam Rizki & Nandang, 2024: 3748) *Innovation* ialah hasil pemikiran yang mencakup gagasan, barang, peristiwa, cara yang dialami ataupun dilihat selaku suatu hal yang baru untuk individu ataupun sekelompok orang, baik itu mencakup hasil *invention* ataupun *discovery*. Menurut Firmansyah (dalam Rizki & Nandang, 2024: 3748) Inovasi dimaknai selaku ide, gagasan, praktik ataupun objek yang dilandasi serta diterima selaku hal yang baru sama individu ataupun kelompok agar diadopsi. Inovasi dalam hakikatnya ialah hasil pemikiran cemerlang yang berkarakteristik sama hal yang baru, bisa berbentuk praktik tertentu maupun berbentuk produk dari suatu hasil olah pikir serta olah teknologi yang di implemtasikan lewat proses tertentu.

Ambarwati (dalam Rizki & Nandang, 2024: 3748) memaparkan secara spesifik terkait “inovasi merupakan suatu proses yang akan terus terjadi karena melibatkan beberapa faktor yang berasal dari dalam diri manusia atau dari luar diri manusia. Dalam KBBI, inovasi berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal

baru, atau pembaruan. Selain itu, inovasi juga bisa diartikan sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Selain itu menurut Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisanasiptek), inovasi didefinisikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Gambar 1. 16 Kriteria inovasi



Sumber: LAN (dalam Muhammad, dkk 2021:113)

Noor (dalam Ratih, 2016: 124) menyimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan baru, inovasi muncul sebagai bentuk pengetahuan baru yang diterima oleh masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu. Pengetahuan ini menjadi faktor kunci yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.
2. Cara baru, inovasi juga bisa berupa metode atau pendekatan baru yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Metode baru ini menggantikan cara lama yang sebelumnya digunakan.
3. Objek baru, inovasi merupakan suatu objek yang baru bagi penggunaannya, yang bisa berbentuk fisik atau nyata (*tangible*), maupun yang tidak berwujud atau bersifat abstrak (*intangible*).
4. Teknologi baru, inovasi seringkali terkait dengan kemajuan teknologi. Banyak inovasi lahir dari perkembangan teknologi terbaru. Ciri khas produk teknologi yang inovatif biasanya terlihat dari fitur-fitur baru yang ada pada produk tersebut.
5. Penemuan baru, sebagian besar inovasi berasal dari penemuan baru. Sangat jarang inovasi terjadi secara kebetulan karena inovasi merupakan hasil dari proses yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan yang disengaja.

Dengan demikian inovasi dapat didefinisikan sebagai proses penciptaan dan penerapan gagasan, metode, atau produk baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Inovasi lahir dari pemikiran kreatif dan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, memberikan solusi atas masalah, serta mendorong perubahan yang berkelanjutan. Inovasi dapat bersifat individual maupun kolektif, dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat keberhasilan dari bagaimana adopsi inovasi sistem *tunnel* garam tidak hanya diterapkan, tetapi juga disebarluaskan melalui pelatihan dan praktik langsung kepada masyarakat, khususnya petani garam di berbagai wilayah pesisir. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam menyosialisasikan pengetahuan baru, menyediakan sarana pelatihan.

1.6.6 Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi pertama kali dikenalkan pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903, oleh seorang sosiolog asal Prancis bernama Gabriel Tarde melalui konsep Kurva Difusi berbentuk S (*S-Shaped Diffusion Curve*). Kurva ini menjelaskan pola adopsi suatu inovasi oleh individu atau kelompok secara bertahap, yang diamati berdasarkan dimensi waktu (Isra & Muktiali, 2022). Selanjutnya, pengembangan teori difusi inovasi berlanjut pada tahun 1960-an, ketika kajian dan penelitian mengenai difusi mulai diperluas ke berbagai bidang yang lebih modern seperti pemasaran, kebudayaan, dan lainnya. Pada periode ini, muncul sejumlah tokoh penting dalam pengembangan teori ini, di antaranya Everett M. Rogers dengan karya terkenalnya *Diffusion of Innovations* (1961), kemudian bersama F. Floyd Shoemaker

menulis buku *Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach* (1971), serta Lawrence A. Brown yang menulis *Innovation Diffusion: A New Perspective* pada tahun 1981 (dalam Isra & Muktiali, 2022).

Perta (dalam Resinta dkk, 2024: 4) menjelaskan Everret M. Rogers memperkenalkan teori difusi inovasi pada tahun 1962, Ia menjelaskan mengenai cara pengenalan dan adaptasi suatu inovasi, sebuah ide, kegiatan atau objek yang mempunyai unsur kebaruan di dalamnya kepada suatu komunitas. Seiring berjalannya waktu inovasi dalam perkembangannya mempraktikkan dirinya tidak hanya dalam bentuk ide-ide, aktivitas, ataupun barang tetapi juga dalam bentuk metode, teknologi, gerakan sosial, sistem sosial, sistem nilai.

Difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara pada anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah jenis komunikasi khusus, di mana pesan-pesannya berkaitan dengan ide-ide baru. Selain itu difusi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial, yang didefinisikan sebagai proses terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial (Rogers, 2003).

Difusi inovasi adalah suatu proses ketika inovasi dikomunikasikan atau disebut melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial (Rogers, 2003). Nababan (dalam Rani, 2020: 25) tujuan utama difusi inovasi adalah diadopsinya inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Adopsi

dimaknai sebagai keputusan untuk menggunakan inovasi dan penolakan dimaknai sebagai keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi (Rogers, 2003).

Proses difusi inovasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat persuasif, yang tujuannya tidak sekadar untuk menyampaikan informasi atau meningkatkan pengetahuan (kognitif), tetapi lebih jauh diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku. Artinya, individu dalam sistem sosial tertentu tidak hanya memahami inovasi, tetapi juga menerima dan menggunakannya dalam kehidupan atau aktivitas mereka (Rani, 2020).

Everett Rogers (2003) menjelaskan bahwa terdapat empat elemen utama dalam difusi inovasi, yaitu:

1. Inovasi

Inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit adopsi lainnya (Rogers, 2003).

Dalam inovasi terdapat beberapa karakteristik yang membentuknya, berikut atribut atau karakteristik dari inovasi:

a. Keunggulan relatif (*Relative Advantage*)

Tingkat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Faktor penting dari keunggulan relatif dapat diukur dalam istilah ekonomi, faktor prestise sosial, kemudahan, dan

kepuasan. Semakin besar keunggulan relatif suatu inovasi semakin cepat tingkat adopsinya.

b. Kesesuaian (*Compatibility*)

Tingkat dimana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengadopsi. Suatu ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma suatu sistem sosial tidak akan cepat diadopsi.

c. Kompleksitas (*Complexity*)

Tingkat dimana suatu inovasi dianggap sulit dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi mudah dipahami oleh sebagian besar anggota sistem sosial yang lain lebih rumit dan diadopsi lebih lambat.

d. Dapat diuji (*Trialability*)

Tingkat dimana suatu inovasi dapat diujicobakan secara terbatas. Gagasan baru yang memungkinkan untuk diuji atau diterapkan secara bertahap biasanya lebih cepat diadopsi dibandingkan inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu.

e. Dapat diamati (*Observability*)

Tingkat dimana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah bagi individu untuk melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsinya

2. Saluran komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai suatu proses di mana para pelaku terlibat dalam penciptaan dan pertukaran informasi guna membangun pemahaman bersama (Rogers, 2003). Dalam konteks ini, saluran komunikasi berperan sebagai media atau jalur yang memungkinkan pesan-pesan berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Karakter hubungan dalam pertukaran informasi antara dua pihak sangat mempengaruhi apakah sumber informasi akan menyampaikan inovasi kepada penerima serta sejauh mana dampak dari proses penyampaian tersebut terhadap penerima inovasi.

Saluran komunikasi dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Saluran interpersonal, melibatkan pertukaran tatap muka antara dua orang atau lebih.
- b. Saluran media massa, segala bentuk penyampaian pesan yang menggunakan media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan media sejenis lainnya merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan satu atau beberapa individu untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar secara sekaligus.

3. Jangka waktu

Waktu adalah elemen ketiga dalam proses penyebaran. Banyak penelitian ilmu perilaku lainnya yang tidak lekang oleh waktu dalam artian bahwa dimensi waktu diabaikan begitu saja atau tidak menjadi masalah. Konfirmasi keputusan berkaitan erat dengan dimensi waktu, yang mencerminkan bagaimana seseorang mengambil keputusan serta tingkat keinovatifannya

dalam merespons suatu inovasi. Hal ini mencakup seberapa cepat atau lambat individu mengakomodasi inovasi tersebut, serta sejauh mana inovasi tersebut diadopsi dalam suatu sistem sosial atau lingkungan inovatif. Rogers juga menguraikan tahapan proses keputusan inovasi yang terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), persuasi (*persuasion*), keputusan (*decision*), implementasi (*implementation*), dan konfirmasi (*confirmation*).

4. Sistem sosial

Sistem sosial didefinisikan sebagai sekumpulan unit yang saling terkait yang terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Anggota atau unit sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan/atau subsistem.

Setiap unit dalam suatu sistem sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dari unit-unit lainnya, namun seluruh anggota sistem tersebut berinteraksi dan bekerja sama untuk mencari solusi atas permasalahan bersama serta mencapai tujuan kolektif. Kerja sama dan pembagian peran ini menjadi elemen pengikat dalam sistem sosial tersebut. Penyebaran inovasi berlangsung di dalam kerangka sistem sosial, dan struktur sosial yang ada di dalamnya sangat mempengaruhi proses difusi inovasi. Sistem sosial juga membatasi ruang lingkup di mana inovasi dapat tersebar. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi penyebaran inovasi, yaitu:

- a. Struktur sosial, yang menentukan pola hubungan dan interaksi antar anggota sistem
- b. Norma sosial, yang berperan dalam mendukung atau menghambat adopsi inovasi
- c. Pemimpin opini dan agen perubahan, yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi dan keputusan anggota sistem terhadap inovasi
- d. Jenis keputusan inovasi, apakah keputusan diambil secara individu, kolektif, atau oleh otoritas tertentu
- e. Konsekuensi inovasi, yaitu dampak yang ditimbulkan dari adopsi inovasi terhadap sistem sosial tersebut.

Everett Rogers (2003) menjelaskan bahwa terdapat kategori pengguna berdasarkan inovasi, yaitu:

- a. *Innovators* (Inovator), individu yang paling awal mencoba inovasi; berani mengambil risiko dan terbuka terhadap hal-hal baru.
- b. *Early Adopters* (Pengadopsi Awal), pemimpin opini yang cepat menerima inovasi dan menjadi panutan bagi kelompok lain.
- c. *Early Majority* (Mayoritas Awal), kelompok yang mulai mengadopsi setelah melihat keberhasilan awal inovasi.
- d. *Late Majority* (Mayoritas Akhir), mengadopsi inovasi setelah sebagian besar masyarakat melakukannya; cenderung berhati-hati dan skeptis.

- e. *Leggards* (Terbelakang), kelompok terakhir yang menerima inovasi; biasanya bersifat tradisional dan sulit menerima perubahan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, karena membahas bagaimana inovasi sistem *tunnel* garam disebarkan kepada masyarakat melalui mekanisme komunikasi dan intervensi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Teori ini menekankan bahwa proses difusi dipengaruhi oleh empat elemen utama, yaitu: inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Dalam konteks penelitian ini, sistem *tunnel* garam merupakan bentuk inovasi yang diperkenalkan melalui pelatihan dan interaksi antar aktor, berlangsung dalam kurun waktu tertentu, serta melibatkan struktur sosial antara petani, pemerintah, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, teori ini menjadi kerangka konseptual yang tepat untuk menganalisis bagaimana suatu inovasi dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat.

1.6.7 Faktor-Faktor Difusi Inovasi

Menurut Rogers (dalam Rachmad, dkk., 2022: 520) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi secara alami/aturan dari proses difusi inovasi, yaitu:

1. *Knowledge of innovation and reinvention*

Faktor ini mencerminkan sejauh mana organisasi memiliki kepekaan terhadap perubahan serta kemampuan memahami karakter dan keunggulan inovasi yang diterapkan. Rogers (2003), menjelaskan bahwa proses difusi dimulai dari tahap pengetahuan (*knowledge stage*), yaitu saat individu atau organisasi mulai mengenal serta memahami fungsi dan manfaat suatu inovasi. Tahap ini berlanjut pada proses *reinvention*, yaitu kemampuan organisasi dalam menyesuaikan atau memodifikasi inovasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan internalnya.

2. *External Accountability*

Akuntabilitas eksternal menggambarkan sejauh mana organisasi bergantung serta bertanggung jawab terhadap, lingkungan di sekitarnya baik itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lain di luar organisasi. Rogers (2003) menekankan bahwa tekanan atau ekspektasi dari pihak eksternal, seperti regulasi maupun tuntutan publik, dapat berpengaruh terhadap tingkat penerapan inovasi. Tekanan tersebut bisa menjadi pendorong jika organisasi mampu merespons secara positif, tetapi juga bisa menjadi penghambat apabila organisasi tidak siap terhadap tuntutan tersebut.

3. *Lack Resources*

Faktor ini berkaitan dengan kondisi kesiapan organisasi dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses inovasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi dana, tenaga ahli, sarana pendukung, maupun infrastruktur organisasi. Rogers (2003) menyebut bahwa keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan utama dalam proses difusi inovasi, karena inovasi membutuhkan dukungan material dan nonmaterial yang memadai.

4. *Organizational Structure*

Struktur organisasi menunjukkan bagaimana bagian-bagian dan subsistem dalam organisasi diatur serta berinteraksi satu sama lain. Rogers (2003) mengemukakan bahwa struktur organisasi yang bersifat terbuka, partisipatif, dan fleksibel akan lebih mendukung penyebaran informasi serta ide-ide baru, dibandingkan dengan struktur yang hierarkis dan kaku.

Sementara Ahmad H Tolba dan Maha Mourad (2011) menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor yang berperan dalam proses penerimaan dan penyebaran inovasi, yaitu faktor individu dan budaya. Faktor individu mencakup peran pengguna utama dan pemimpin opini, sementara faktor budaya diwakili oleh penghindaran ketidakpastian dan individualisme.

Forlani & Parthasarathy (dalam Ahmad H Tolba dan Maha Mourad, 2011: 6) dalam faktor individu salah satu pemain utama yang mempercepat proses difusi adalah pemimpin opini. Pemimpin opini dianggap memiliki akses yang lebih besar ke media massa serta jaringan interpersonal dibandingkan dengan pengikutnya. Selain itu, mereka dianggap memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan cenderung mengadopsi ide-ide inovatif baru sebelum pengikutnya. Goldsmith dan Witt (dalam Ahmad H Tolba dan Maha Mourad, 2011: 8) juga mengidentifikasi kepemimpinan opini sebagai salah satu dimensi pengguna utama, sejumlah peneliti menyebutkan bahwa inovasi merupakan salah satu atribut utama kepemimpinan opini.

Menurut Triandis (1995) dan Steenkamp dkk (1999), individualisme dan kolektivisme merupakan faktor budaya yang paling menentukan dalam proses adopsi inovasi. Pada masyarakat individualis, keputusan cenderung didasarkan pada keyakinan serta penilaian pribadi, sehingga norma kelompok tidak menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Wickliffe & Pysarchik (2001) mengemukakan bahwa pada masyarakat kolektif, keputusan banyak dipengaruhi oleh konsensus kelompok dan hubungan sosial yang kuat di antara anggota kelompok (dalam Ahmad H. Tolba dan Maha Mourad, 2011: 7).

Hofstede 2001 dan Dwyer dkk (2005) Penghindaran Ketidakpastian adalah dimensi budaya penting lainnya yang mempengaruhi adopsi inovasi.

Hal ini mengacu pada tingkat toleransi terhadap risiko. Kalliny & Hausman (2007) dan Perez-Alvarez (2009) Penghindaran Ketidakpastian yang tinggi menyebabkan munculnya aturan-aturan yang kaku dalam masyarakat, dan diperkirakan akan memperlambat penerimaan dan penyebaran inovasi (dalam Ahmad H. Tolba dan Maha Mourad, 2011: 7).

1.6.8 Tunnel Garam

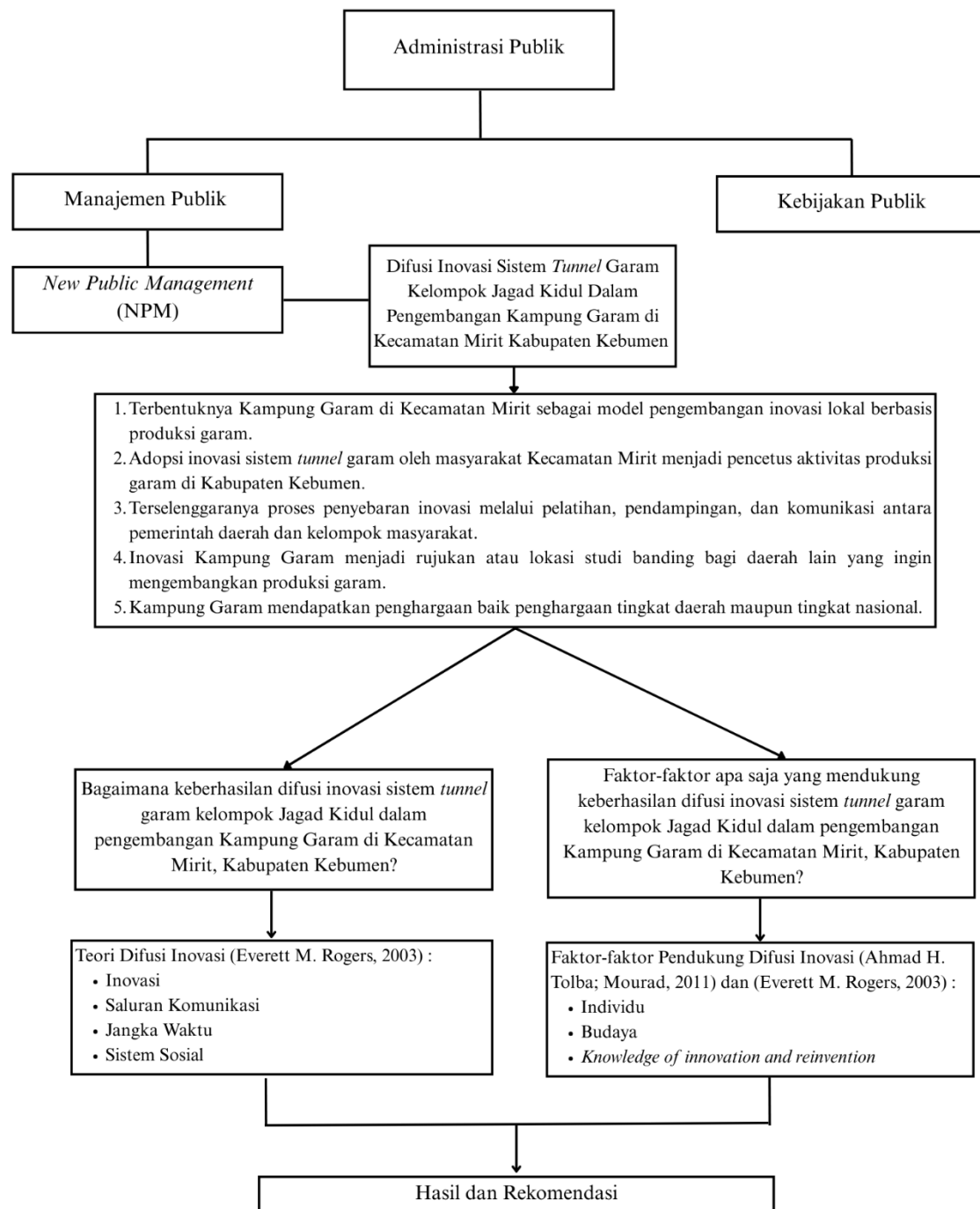
Produksi garam di Kampung Garam Mirit menggunakan metode *tunnel* atau rumah garam, yaitu sistem modern yang memanfaatkan media plastik *ultraviolet* (UV) sebagai atap penutup lahan kristalisasi. Sistem ini membuat proses penguapan air laut lebih cepat, higienis, dan tidak tergantung pada kondisi cuaca. Sistem *tunnel* garam dinilai lebih efisien dibandingkan cara tradisional karena mampu menghasilkan garam dengan kualitas tinggi, lebih putih, dan memiliki kandungan mineral yang lebih baik.

Sistem *tunnel* garam merupakan metode produksi garam dengan memanfaatkan struktur rangka berbentuk terowongan yang dilapisi plastik transparan. Rangka *tunnel* umumnya terbuat dari besi atau bambu yang disusun memanjang di atas meja kristalisasi, sementara penutup plastik berfungsi melindungi air garam dari hujan sekaligus

meningkatkan suhu di dalam tunnel. Pada bagian dasar digunakan *geomembrane*.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 17 Kerangka Berpikir



Tabel 1. 2 Fenomena Penelitian

Fokus Penelitian	Fenomena	Sub Fenomena
Difusi inovasi sistem <i>tunnel</i> garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.	Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan relatif (<i>Relative Advantage</i>) 2. Kesesuaian (<i>Compatibility</i>) 3. Kompleksitas (<i>Complexity</i>) 4. Dapat diuji (<i>Trialability</i>) 5. Dapat diamati (<i>Observability</i>)
	Saluran komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis saluran komunikasi (Interpersonal dan media massa)
	Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) 2. Persuasi (<i>Persuasion</i>) 3. Keputusan (<i>Decision</i>) 4. Implementasi (<i>Implementation</i>) 5. Konfirmasi (<i>Confirmation</i>)
	Sistem sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jejaring kerja sama 2. Peran pemimpin 3. Bentuk perilaku dalam menerima inovasi
Faktor-faktor yang mendukung Difusi inovasi sistem <i>tunnel</i> garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.	Individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan komitmen aktor lokal 2. Motivasi individu untuk berinovasi 3. Keterbukaan terhadap pembaruan 4. Kemampuan individu dalam mempengaruhi anggota kelompok lain
	Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai gotong royong masyarakat pesisir 2. Pola komunikasi dan interaksi 3. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
	<i>Knowledge of innovation and reinvention</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terkait cara kerja 2. Kemampuan menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal 3. Peran penyuluh dan pelatihan 4. Tingkat partisipasi

Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah Teori Difusi Inovasi oleh Everett M. Rogers (2003), yang menjelaskan proses penyebaran inovasi melalui empat elemen utama, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial dimana suatu inovasi disebarkan dari waktu ke waktu melalui saluran komunikasi tertentu di antara anggota suatu sistem sosial hingga akhirnya diadopsi secara luas.

Untuk memperkuat analisis, terhadap faktor-faktor yang mendukung proses difusi inovasi, penelitian ini juga menggunakan kolaborasi pendapat dari Ahmad H. Tolba dan Maha Mourad (2011) serta Rogers (2003). Kedua sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi tiga faktor utama yang berperan dalam keberhasilan difusi inovasi, yaitu faktor individu, faktor budaya, dan faktor *knowledge of innovation and reinvention*. Setiap fenomena tersebut diamati melalui sub-fenomena yang muncul di lapangan, guna memahami bagaimana ketiga faktor tersebut berperan dalam mendukung proses difusi inovasi sistem *tunnel* garam di Kampung Garam, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian ini atas dasar adanya tuntutan untuk mencapai target Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang bertujuan mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan garam nasional melalui pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas

petambak garam, serta integrasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung inovasi dan produktivitas sektor pergaraman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mempercepat adopsi inovasi berbasis lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pergaraman. Dalam konteks pembangunan daerah, inovasi tidak hanya menjadi alat peningkatan produktivitas, tetapi juga bagian dari strategi adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, musim, dan teknologi. Penerapan difusi Inovasi *tunnel* garam di Kabupaten Kebumen merupakan contoh konkrit dari penerapan teknologi sederhana namun berdampak nyata terhadap efektivitas produksi garam.

Keberhasilan inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam mendorong pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit tidak terlepas dari dukungan aktif berbagai aktor lokal, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses difusi inovasi melalui perancangan kebijakan, penyediaan pelatihan, dan pembangunan ekosistem sosial yang mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom untuk mengelola potensi lokal melalui pendekatan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana proses difusi inovasi sistem *tunnel* garam berlangsung dan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk adaptasi lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers sebagai landasan analisis, dengan empat elemen utama, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Teori ini juga menyediakan lima atribut inovasi (keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, keterujian, dan observabilitas) yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana inovasi ini dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam proses difusi ini, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator adopsi inovasi, melalui pembentukan kepercayaan, pendampingan teknis, serta penciptaan dukungan kebijakan dan kelembagaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam membangun model Kampung Garam yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe penelitian

Penelitian ini berjudul “Difusi Inovasi Sistem *Tunnel* Garam Kelompok Jagad Kidul Dalam Pengembangan Kampung Garam di

Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dianggap paling tepat untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana inovasi diperkenalkan, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara utuh proses yang terjadi di lapangan, bukan hanya melihat dari permukaan saja.

Metode yang digunakan adalah studi kasus karena fokus penelitian mengarah pada satu fenomena spesifik, yaitu sistem *tunnel* garam yang akhirnya menjadi Kampung Garam sebagai bagian dari strategi difusi inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan studi kasus, peneliti bisa mengeksplorasi aktivitas, dinamika, dan pengalaman para pihak yang terlibat secara lebih mendalam. Informan yang dilibatkan pun beragam, agar peneliti mendapatkan perspektif yang kaya dan tidak sepihak.

Peneliti bisa menyesuaikan dengan situasi di lapangan sehingga mampu menangkap makna di balik setiap proses yang berlangsung. Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis berdasarkan kenyataan yang ditemukan selama penelitian berlangsung, untuk menggambarkan secara nyata bagaimana peran pemerintah daerah mendorong inovasi lokal, faktor apa saja yang muncul, serta bagaimana inovasi itu diterima oleh masyarakat di Kebumen.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers dan Ahmad H Tolba dan Maha Mourad. Meskipun kedua teori ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, namun dalam konteks penelitian ini, keduanya digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Teori Difusi Inovasi digunakan untuk melihat bagaimana keberhasilan inovasi *tunnel* garam diterima oleh masyarakat, sedangkan faktor pendukung difusi inovasi yang dikemukakan oleh Ahmad H Tolba dan Maha Mourad serta faktor yang mempengaruhi secara alami menurut Rogers, yaitu untuk membantu menjelaskan faktor individu, budaya, dan *Knowledge of innovation and reinvention* yang berdampak pada proses adopsi inovasi. Penggunaan teori ini dalam pendekatan kualitatif tetap relevan karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara kontekstual bagaimana proses difusi dan adopsi inovasi berjalan di lapangan.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dilakukan di Kampung Garam Desa Miritpetikusan Kabupaten Kebumen yang berada di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai batasan pemilihan lokus.

1.10.3 Subjek Penelitian

Metode dalam menentukan informan yang digunakan yaitu menggunakan teknik *purposive* atau informan yang terpilih dan teknik *snowball sampling*. Teknik *purposive* adalah teknik pemilihan informan yang dipilih oleh peneliti secara khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. *Snowball sampling* adalah teknik yang mula-mula jumlahnya kecil dan kemudian membesar (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 2024). Teknik *snowball sampling* dilakukan dengan cara penentuan sampel dimana jumlah informan semakin bertambah melalui rekomendasi dari informan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penentuan subjek tentunya didasarkan pada pertimbangan berbagai pihak yang dapat memberikan informasi tentang Difusi Inovasi Sistem *Tunnel* Garam Kelompok Jagad Kidul Dalam Pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen:

1. Ketua Bidang Perikanan Tangkap Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP) Kabupaten Kebumen. Dipilih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Bidang Perikanan Tangkap Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP) merupakan bidang yang menaungi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Kampung Garam. Bidang ini berperan langsung dalam proses difusi inovasi sistem *tunnel* garam, mulai dari menginisiasi program,

memfasilitasi kegiatan, memberikan pendampingan dan penyuluhan lapangan.

2. Ketua kelompok petani garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Dipilih karena memiliki posisi kepemimpinan dalam kelompok petani garam dan mengetahui proses pelaksanaan pelatihan *tunnel* garam serta dinamika adopsi inovasi di tingkat kelompok.
3. Kelompok petani garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang mendapatkan pelatihan. Dipilih karena menjadi penerima langsung pelatihan *tunnel* garam dan dapat memberikan informasi mengenai pengalaman mereka dalam menerapkan inovasi, termasuk manfaat dan hambatan yang dirasakan.
4. Lurah Desa Miritpetikusan dan Camat Mirit Kabupaten Kebumen. Dipilih karena berperan dalam mendukung pelaksanaan program inovasi di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memahami respon sosial masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah daerah.

1.10.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa deskripsi terkait difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan kampung garam di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan yang mencerminkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta pihak terkait dalam proses difusi inovasi Kampung Garam di Kabupaten Kebumen.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan kualitatif, menggunakan tabel dan angka. Data ini diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, statistik dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP), serta lembaga terkait lainnya.

1.10.5 Sumber data

Dalam penelitian di Kampung Garam Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder, adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui teknik wawancara dan observasi lapangan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara

dengan informan kunci, seperti ketua kelompok petani garam Jagad Kidul Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi Kampung Garam, Kecamatan Mirit, untuk mengetahui secara langsung implementasi sistem *tunnel*, serta aktivitas produksi garam.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber dokumentasi yang relevan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari, dokumen resmi seperti undang-undang, Peraturan Presiden, Perda terkait pengembangan garam, *website* resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan instansi terkait, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, berita daring yang berkaitan dengan difusi inovasi, serta dokumentasi penghargaan, foto dan sertifikat kegiatan pelatihan, penghargaan, serta dokumentasi Kampung Garam dan inovasi *tunnel* garam.

1.10.6 Teknik Pengumpulan

Untuk menggali informasi secara mendalam terkait difusi inovasi sistem *tunnel* garam kelompok Jagad Kidul dalam

pengembangan Kampung Garam di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, agar data yang didapatkan lebih sistematis dan akurat.

1. Observasi

Observasi dilakukan langsung di lokasi Kampung Garam, yaitu di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Penulis mengamati bagaimana aktivitas para petani garam berlangsung, seperti proses produksi garam dengan sistem *tunnel*. Observasi ini membantu penulis melihat secara langsung situasi yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan bersifat non-partisipatif, artinya penulis hanya menjadi pengamat tanpa terlibat langsung dalam kegiatan.

2. Wawancara

Wawancara secara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara lebih detail dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam difusi inovasi sistem *tunnel* garam dalam pengembangan Kampung Garam, wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci agar data informasi yang didapatkan bersifat aktual, faktual, dan dapat dipercaya. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, artinya peneliti memiliki daftar pertanyaan sebagai panduan, namun tetap fleksibel mengikuti alur percakapan. Hal ini

dimaksudkan agar informan merasa nyaman saat berbagi cerita dan pengalaman.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai jenis dokumen, seperti artikel, jurnal akademik, catatan dan regulasi yang relevan, serta hasil dokumentasi berupa catatan dan rekaman dari proses wawancara. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto, video, maupun data lain yang berkaitan dengan topik penelitian dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi data

Peneliti menggunakan tiga langkah utama dalam proses analisis data menggunakan teknik analisis data dari teori Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Saldana (dalam, Sugiyono, 2024: 134), yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

1. Kondensasi data

Merupakan proses menyederhanakan, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasi data lapangan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menemukan pola atau makna. Dalam literatur lain seperti Sugiyono (2024), tahap ini dikenal juga sebagai *reduksi data*. Dalam proses ini, peneliti menyeleksi serta

menyaring informasi yang relevan, dan mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti: difusi inovasi, proses pelatihan *tunnel* garam, respon masyarakat (petani garam), serta faktor-faktor yang mendukung difusi inovasi. Tujuan dari tahap ini adalah agar data menjadi lebih terarah dan mudah dikelola dalam tahap analisis berikutnya.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan difusi inovasi, faktor-faktor yang mendukung difusi inovasi, menggunakan teks yang bersifat naratif serta didukung oleh tabel yang membantu menjelaskan penelitian. Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat hubungan sebab-akibat serta dinamika yang terjadi selama proses difusi berlangsung.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian ini, peneliti menyimpulkan temuan-temuan utama berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan akan terus diuji melalui proses verifikasi, baik dengan kembali pada data lapangan, melakukan triangulasi sumber, maupun berdiskusi dengan informan atau pihak terkait lainnya. Penarikan kesimpulan

ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan bagaimana keberhasilan difusi inovasi sistem *tunnel* garam Kelompok Jagad Kidul dalam pengembangan Kampung Garam di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, termasuk faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses tersebut.

1.10.8 Kualitas data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, triangulasi sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2024). Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara objektif dan mendalam.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki sudut pandang dan keterlibatan berbeda dalam Kampung Garam dan sistem

tunnel. melakukan perbandingan antara data yang diperoleh melalui observasi lapangan, data sekunder, serta hasil wawancara dengan para informan utama. Peneliti membandingkan hasil wawancara informan apakah yang disampaikan langsung dengan penyampaian di media sesuai atau berbeda.

2. Triangulasi teknik

Dalam penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Seperti, informasi yang diperoleh dari wawancara mengenai difusi inovasi sistem *tunnel* garam akan dikonfirmasi melalui observasi langsung di lapangan serta diperkuat dengan bukti dokumen atau foto.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data di waktu yang berbeda, seperti menguji data yang didapat dari narasumber yang sama dalam waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan, dengan demikian, peneliti dapat menilai stabilitas data serta menghindari penilaian yang hanya berdasarkan pada satu momen atau kondisi tertentu saja.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik, Triangulasi dipahami sebagai upaya menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan menyeluruh terhadap realitas di lapangan. Melalui triangulasi sumber, peneliti membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki sudut pandang berbeda, serta mencocokkan pernyataan yang disampaikan secara langsung dan di ruang publik. Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kesesuaian data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan menerapkan kedua pendekatan ini, peneliti berupaya menjaga keakuratan dan integritas data dalam menggambarkan difusi inovasi Kampung Garam di Kabupaten Kebumen.